Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1625-1633

PERAN POLITIK SEBAGAI FAKTOR PENENTU KEBIJAKAN EKONOMI : STUDI LITERATUR DALAM PEMERINTAHAN MODERN

Mutia Annisa[1], Agnes Monica Sianipar[2], Enjel Widia Sari Gea[3], Nakita[4], Respa Mellia Sirait[5],Albi Sutandi[6]
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan[1,2,3,4,5,6]
Email: mutiaannisa1207@gmai.com[1], monica71891@gmail.com[2], enjelgea59@gmail.com[3], nakitasaja905@gmail.com[4], respamellia@gmail.com[5], albibinjai11@gmail.com[6]

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran politik dalam pembentukan kebijakan ekonomi di Indonesia melalui metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku teks teori ekonomi politik, serta artikel akademik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan teknis dan rasionalitas ekonomi, tetapi juga oleh dinamika politik, ideologi pemerintah, stabilitas institusi, dan kepentingan aktor tertentu.
Kata Kunci: Ekonomi Politik, Kebijakan Ekonomi, Pengambilan Keputusan.

Abstract
This study aims to analyze the role of politics in economic policy-making in Indonesia through a literature review using a qualitative approach. The data sources used include national and international scientific journals, political economy theory textbooks, and academic articles. The results of this study indicate that economic policy is not only influenced by technical considerations and economic rationality, but also by political dynamics, government ideology, institutional stability, and the interests of certain actors.
***Keywords**: Political Economy, Economic Policy, Decision Making*.

Pendahuluan
Politik, dalam sistem demokrasi kontemporer, memiliki tanggung jawab strategis untuk menentukan arah pembangunan bangsa, termasuk dalam hal kebijakan ekonomi. Frieden (2020) mengatakan bahwa dinamika politik, seperti kepentingan aktor, tekanan publik, dan stabilitas kekuasaan, memengaruhi keputusan ekonomi pemerintah. Dengan kata lain, kebijakan ekonomi adalah gabungan dari pemikiran rasional ekonomi dan politik. Proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor politik. Proses ini berdampak langsung pada stabilitas ekonomi, pertumbuhan nasional, distribusi kekayaan, dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan ekonomi dan politik terkait satu sama lain secara teoritis. Aktor-aktor politik, baik dari lembaga eksekutif maupun legislatif, memiliki otoritas untuk menetapkan prioritas pembangunan, menetapkan anggaran negara, dan menetapkan regulasi yang menentukan jalan untuk kemajuan ekonomi baik

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1625-1633

jangka pendek maupun jangka panjang. Persson dan Tabellini (2000) juga membahas hubungan antara politik dan kebijakan ekonomi. Mereka menemukan bahwa arah kebijakan ekonomi, seperti pajak, belanja negara, dan investasi publik, dipengaruhi oleh sistem politik, termasuk lembaga dan mekanismenya. Politik memengaruhi siapa yang membuat keputusan ekonomi, bagaimana prioritas dibuat, dan kelompok mana yang mendapatkan keuntungan dari kebijakan. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian tambahan yang dilakukan oleh Humphreys (2005), stabilitas dan kualitas institusi politik merupakan faktor penting dalam keberhasilan kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi negara dengan sistem politik yang kuat dan akuntabel cenderung lebih konsisten dan berorientasi jangka panjang dibandingkan dengan kebijakan ekonomi negara dengan sistem politik yang lemah.

Teori Pilihan Publik, yang diciptakan oleh James Buchanan dan Gordon Tullock, menjelaskan peran politik dalam pembentukan kebijakan ekonomi. Buchanan (1962) menyatakan bahwa bukan hanya kepentingan publik yang mempengaruhi proses pengambilan kebijakan ekonomi, tetapi juga motif pribadi dari politisi, birokrat, dan kelompok kepentingan yang terlibat dalam politik. Akibatnya, kebijakan sering kali mencerminkan insentif politik daripada efisiensi ekonomi. Menurut Buchanan, "kebijakan publik adalah hasil dari kalkulasi rasional para aktor politik yang mengejar kepentingan mereka" daripada mekanisme sosial netral. Selanjutnya, Tullock (1967) memperkenalkan ide rent-seeking, yang merupakan tindakan individu atau kelompok elit yang mempengaruhi kebijakan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Karena pemerintah tidak selalu bertindak sebagai pengatur sosial yang netral, pendapat kedua ahli ini memperkuat pemahaman bahwa politik memiliki peran dominan dalam arah kebijakan ekonomi. Menurut teori ekonomi politik yang dibuat oleh Acemoglu dan Robinson (2012), institusi politik memainkan peran penting dalam menentukan apakah suatu negara dapat membuat kebijakan ekonomi yang inklusif atau eksploitatif. Institusi yang inklusif mendorong inovasi dan kesempatan ekonomi yang sama, dan memberikan ruang yang luas untuk partisipasi masyarakat. Sebaliknya, institusi eksploitatif cenderung membuat kebijakan ekonomi yang berfokus pada kepentingan elit politik dan kurang berpihak pada pembangunan jangka panjang. Perspektif ini memperkuat pemahaman bahwa kualitas institusi politik sangat menentukan arah dan hasil dari kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah.

Pentingnya peran politik dalam pembuatan kebijakan ekonomi di Indonesia mencakup aspek legislasi serta proses perumusan kebijakan yang berdampak luas dan berkelanjutan. Stabilitas politik, legitimasi kekuasaan, tekanan publik, dan kepentingan pembangunan nasional adalah beberapa faktor yang sering dipertimbangkan saat membuat kebijakan ekonomi, menurut dinamika politik. Kekuatan politik memengaruhi ekonomi negara melalui kebijakan industri, kebijakan investasi, pengelolaan sumber daya, dan keputusan fiskal. Menurut penelitian Gabriel (2008), proses pembuatan kebijakan ekonomi tidak terpengaruh oleh faktor politik seperti dukungan parlemen, agenda pemerintah, dan keadaan politik nasional. Ini menunjukkan bahwa negosiasi politik yang melibatkan pemerintah, lembaga legislatif, dan kelompok kepentingan membentuk kebijakan

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1625-1633

ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi pada dasarnya merupakan hasil dari keputusan politik yang dipengaruhi oleh ideologi, visi pembangunan, kepentingan, dan situasi sosial dan global.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran politik dalam pembentukan kebijakan ekonomi. Penelitian ini akan berkonsentrasi pada bagaimana politik membentuk proses perumusan kebijakan ekonomi, faktor apa saja yang memengaruhinya, dan bagaimana kondisi politik dapat mendorong atau menghambat pelaksanaan kebijakan ekonomi. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran politik dalam pembentukan kebijakan ekonomi.

Kajian Teori

A. Ekonomi Politik

Analisis ekonomi politik Indonesia membahas hubungan antara kekuasaan politik dan aktivitas ekonomi dalam konteks ideologis dan institusional negara. Pancasila, yang menekankan ekonomi kerakyatan dan tanggung jawab sosial negara, sering digunakan sebagai fondasi ekonomi politik Indonesia. Sebagai contoh, neoliberalisme memengaruhi kebijakan ekonomi nasional, mengutamakan kepentingan pemodal dan elit ekonomi asing (Pratiwi, 2023). Namun, retorika Pancasila masih digunakan sebagai legitimasi (Pratiwi, 2023). Selain itu, Asmiati Abdul Malik (2023) menggunakan pendekatan ekonomi institusional untuk memeriksa peran intervensi pemerintah dalam mengatasi kegagalan pasar dan memperjuangkan keadilan ekonomi melalui kebijakan redistributif. Ini menunjukkan bahwa negara memainkan peran penting dalam sistem ekonomi-politik Indonesia.

Menurut Nainggolan (2018), pendekatan ekonomi politik sangat relevan untuk menganalisis kebijakan publik Indonesia karena sistem politik demokrasi memungkinkan persaingan kepentingan antara pelaku negara, partai politik, pelaku ekonomi, dan masyarakat. Artikel tersebut menyimpulkan bahwa kebijakan ekonomi seringkali dibuat karena konflik kepentingan daripada kebutuhan ekonomi yang sebenarnya. Dalam penelitian lain oleh Febriandiela (2023) dijelaskan bahwa orientasi politik pemerintah, opini publik, dan tekanan kelompok kepentingan memengaruhi arah kebijakan ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa prioritas kebijakan ekonomi dipengaruhi oleh faktor politik.

Dinamika ekonomi politik Indonesia dapat dijelaskan dengan sangat baik melalui teori Karl Polanyi "dua gerakan". Dalam penelitian yang dilakukan Nurshafira dan Alvian (2018), ditemukan bahwa munculnya kewirausahaan sosial di Indonesia menunjukkan ketegangan antara logika pasar (disebut "disembedding") dan upaya reintegrasi sosial (disebut "re-embedding"). Polanyi menekankan bahwa ketika struktur sosial dianggap melemahkan oleh pasar, masyarakat akan selalu menahan diri dari perilaku pasar, dan dalam kasus Indonesia, negara memanfaatkan wirausaha sosial untuk

B. Kebijakan Ekonomi

Berbagai kebijakan fiskal, moneter, investasi, perlindungan pangan, dan pembangunan industri adalah bagian dari kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia. Febriandiela (2023) mengatakan bahwa kebijakan ekonomi nasional

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1625-1633

tidak hanya membantu menyelesaikan masalah ekonomi tetapi juga membantu pemerintah legitimasi tindakan politiknya, seperti melalui kebijakan stabilisasi harga, insentif industri, dan subsidi. Pemikiran klasik membentuk kebijakan ekonomi, yang menekankan peran pemerintah dalam mengatur pasar untuk mencapai stabilitas, pertumbuhan, dan kesejahteraan sosial. Teori ini berasal dari perspektif Tinbergen (1952) dan Theil (1958), yang melihat kebijakan sebagai alat kontrol untuk mencapai tujuan jangka panjang seperti full employment dan stabilitas harga dengan menggunakan instrumen independen seperti pajak dan pengeluaran fiskal. Teori ini menjelaskan bahwa perubahan kebijakan dapat mengubah struktur ekonomi secara permanen, menyebabkan "lock-in" (ketergantungan) atau "lock-out" (pengecualian) dari jalur pertumbuhan optimal. Oleh karena itu, pembuat kebijakan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang, seperti perubahan preferensi agen ekonomi. Selain itu, model regulasi yang menekankan peran negara sebagai pemasok regulasi bagi industri yang mendominasi menunjukkan bahwa teori regulasi ekonomi menunjukkan bahwa kebijakan sering digunakan oleh kelompok kepentingan untuk memperoleh keuntungan daripada untuk kepentingan umum.

C. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan adalah proses memilih pilihan terbaik dari berbagai pilihan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengambilan keputusan sangat penting dalam manajemen dan organisasi karena menentukan jalan dan keberhasilan suatu organisasi. Menurut Irham Fahmi (2018), pengambilan keputusan adalah pendekatan sistematis terhadap sifat alternatif yang dihadapi dan penentuan tindakan yang paling tepat. Ia menekankan bahwa proses ini terdiri dari menemukan masalah, mengumpulkan informasi, menilai alternatif, membuat keputusan, dan menerapkannya. Menurut Rizky Eka Febriansah dan Dwi Retno Meiliza (2020), pengambilan keputusan adalah bagian penting dari proses manajemen dan dipengaruhi oleh pengalaman, intuisi, dan nilai-nilai seseorang. Mereka menekankan betapa pentingnya pendekatan kuantitatif dan kualitatif stabilitas untuk membantu membuat keputusan yang efektif, terutama dalam hal perusahaan dan organisasi kontemporer.

Dalam penelitian Kurniawan, Ramdhani, dan Fitrie (2024) tentang pilihan impor beras di Indonesia, mereka menunjukkan bahwa pertimbangan politik, tekanan publik, dan kondisi ekonomi makro memengaruhi proses pengambilan keputusan kebijakan ekonomi. Studi tersebut menemukan bahwa keputusan impor tidak hanya didasarkan pada data teknis ketersediaan pangan nasional, tetapi juga harga, reaksi politik masyarakat, dan momentum politik pemerintah. Menurut Harbani Pasolong (2023), legalitas, efisiensi, dan akuntabilitas harus dipertimbangkan saat membuat keputusan administrasi publik. Ia menekankan bahwa keputusan yang baik dihasilkan dari proses yang sistematis, partisipatif, dan berbasis data, terutama dalam hal kebijakan dan pelayanan publik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan kajian literatur. Kajian literatur dipilih karena sesuai untuk menggali dan menganalisis berbagai ide, konsep, teori, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi. Peneliti yang melakukan penelitian literatur dapat memperoleh

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1625-1633

pemahaman yang lebih mendalam. Menurut Zed (2022:3), metode studi literatur terdiri dari kumpulan informasi dari pustaka, membaca dan mencatat informasi yang relevan, dan mengelola bahan untuk dianalisis secara kritis. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal akademik, laporan hasil penelitian, dokumen resmi, serta data dari lembaga survei dan media online yang dapat dipercaya. Proses untuk menyelesaikan studi literatur ini meliputi:

1 Identifikasi Topik dan Permasalahan: Peneliti menetapkan topik yang akan dipelajari, yaitu Politik sebagai Faktor Penentu Kebijakan Ekonomi: Studi Literatur dalam Konteks Pemerintahan Modern
2 Pengumpulan Literatur: Peneliti mencari dan mengumpulkan literatur yang relevan dari sumber-sumber ilmiah seperti buku politik, sosiologi, ilmu pemerintahan, dan artikel jurnal yang membahas politik sebagai faktor penentu kebijakan ekonomi
3 Evaluasi dan Untuk memahami posisi, argumen, dan hasil utama dari masing-masing referensi, literatur yang dipilih diperiksa secara menyeluruh.
4 Analisis Data: Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menganalisis data literatur. Peneliti mengklasifikasikan data sesuai dengan tema.
5 Kesimpulan: Dari hasil analisis, peneliti membuat kesimpulan yang menjawab pertanyaan dasar dan memberikan gambaran menyeluruh tentang peran politik sebagai faktor penentu kebijakan ekonomi.
6 Dengan membandingkan berbagai sumber literatur yang memiliki perspektif dan pendekatan yang berbeda, triangulasi sumber memastikan validitas penelitian ini. Tujuan dari triangulasi sumber ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih objektif dan menyeluruh tentang topik yang dikaji.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis untuk pemahaman kita tentang politik sebagai faktor penentu kebijakan ekonomi. Hasil kajian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian lebih mendalam dan berbasis lapangan.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran Politik dalam Perumusan Kebijakan Ekonomi

Dalam sistem pemerintahan modern, perumusan kebijakan ekonomi selalu dipengaruhi oleh pergeseran politik yang kompleks. Politik menjadi tempat penting di mana berbagai kepentingan bertemu, bernegosiasi, dan akhirnya menjadi kebijakan ekonomi. Proses membuat undang-undang, menyusun anggaran, dan menetapkan peraturan investasi di Indonesia selalu melibatkan pertimbangan politik yang signifikan. Menurut Gabriel (2008), kebijakan ekonomi harus mendapatkan dukungan politik dari legislatif dan eksekutif. Kebijakan teknokratis seringkali tidak memiliki legitimasi politik dan bahkan mungkin ditunda untuk dilaksanakan.

Pada kehidupan pemerintahan yang demokratis, politik juga berperan sebagai aktor utama. Keberadaan politik merupakan suatu keharusan yang harus ada pada komponen di negara yang menganut demokrasi. Politik berfungsi sebagai

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1625-1633

pemberi akses kepada setiap orang yang akan berpendapat, sebagai perwakilan rakyat ataupun sebagai sarana kepemimpinan politik yang damai. Dalam menjalankan tugasnya, politik ditentukan pada tujuan yang ingin mereka capai, sehingga mereka akan berjuang sekuat tenaga untuk merubah tatanan pemerintahan, sistem ekonomi maupun suatu budaya di masyarakat. Jika sebuah politik berhasil maka mereka akan mengendalikan setiap sistem yang ada di tengah-tengah masyarakat tersebut.

Selain itu, penerapan kebijakan ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa persetujuan politik yang panjang selalu dibutuhkan untuk regulasi strategis dan keputusan fiskal. Pemerintah harus mengimbangi kepentingan para aktor ekonomi, partai politik, dan masyarakat. Proses ini sering kali menghasilkan kebijakan yang dapat diterima secara politik meskipun tidak sepenuhnya rasional dari sudut pandang ekonomi. Kebijakan fiskal, pajak, dan investasi publik dipengaruhi oleh sistem politik dan mekanismenya, menurut Persson dan Tabellini (2000). Sebenarnya, struktur politik yang berkuasa sering mengubah kebijakan ekonomi Indonesia. Ini menunjukkan bahwa politik sangat penting dalam menentukan siapa yang diuntungkan oleh kebijakan ekonomi, bagaimana prioritas pembangunan disusun, dan seberapa lama kebijakan tersebut bertahan.

Dinamika politik internal seperti stabilitas pemerintahan, hubungan antar-lembaga negara, dan tekanan publik juga memengaruhi perumusan kebijakan ekonomi. Stabilitas politik adalah syarat konsistensi kebijakan ekonomi, menurut Humphreys (2005). Sementara negara-negara dengan sistem politik yang akuntabel cenderung membuat kebijakan ekonomi yang berfokus pada masa depan, negara-negara dengan sistem politik yang rapuh sering kali membuat kebijakan yang reaktif dan tidak berkelanjutan. Ini terlihat di Indonesia karena momentum politik, seperti krisis sosial atau menjelang pemilu, sering memengaruhi kebijakan ekonomi. Oleh karena itu, politik memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana kebijakan ekonomi akan berjalan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, politik juga berperan sebagai faktor yang menentukan apakah kebijakan tersebut akan menguntungkan rakyat atau hanya menguntungkan kelompok tertentu.

2. Faktor Politik sebagai Penguat atau Penghambat

Pertimbangan rasional bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi kebijakan ekonomi; kondisi politik juga dapat bertindak sebagai penguat atau penghambat. Stabilitas politik adalah syarat konsistensi kebijakan, menurut Humphreys (2005). Sementara negara-negara dengan sistem politik yang akuntabel cenderung membuat kebijakan ekonomi yang berfokus pada masa depan, negara-negara dengan sistem politik yang rapuh sering kali membuat kebijakan yang reaktif dan tidak berkelanjutan.

Implementasi kebijakan fiskal dan industri sering tertunda oleh perubahan politik yang terjadi di Indonesia. Misalnya, data teknis tentang ketersediaan beras memengaruhi kebijakan impor beras (Kurniawan, Ramdhani, & Fitrie, 2024). Ini menunjukkan bahwa ketika kebijakan ekonomi stabil dan akuntabel, politik dapat memperkuatnya, tetapi juga dapat menghambatnya jika kepentingan elit menjadi lebih kuat.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1625-1633

Selain itu, faktor politik juga dapat menimbulkan keraguan tentang cara pelaksanaan kebijakan ekonomi dilakukan. Kebijakan ekonomi yang telah dibuat biasanya diubah atau bahkan dibatalkan ketika terjadi konflik politik atau pergantian pemerintahan. Kondisi ini mengganggu pertumbuhan ekonomi karena menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan pelaku ekonomi. Akibatnya, stabilitas politik sangat penting untuk keberhasilan kebijakan ekonomi. Dalam perspektif ini, politik dapat dianggap sebagai pedang bermata dua: jika dijalankan dengan akuntabilitas, ia dapat mendukung kebijakan ekonomi, tetapi juga dapat menghambatnya jika terlalu terfokus pada kepentingan jangka pendek.

3. Kepentingan dan Ideologi dalam Kebijakan Ekonomi

Selain faktor stabilitas, keyakinan politik juga memengaruhi kebijakan ekonomi. Melalui teori ekonomi politik, Acemoglu dan Robinson (2012) menyatakan bahwa kualitas institusi politik menentukan apakah kebijakan ekonomi inklusif atau eksploitatif. Institusi yang inklusif mendorong partisipasi masyarakat dan pemerataan kesempatan, sedangkan institusi yang eksploitatif cenderung menghasilkan kebijakan yang menguntungkan elit politik.

Ideologi pembangunan nasional sering kali menjadi dasar kebijakan ekonomi di Indonesia. Misalnya, program bantuan sosial dan kebijakan redistributif lainnya berfungsi sebagai alat ekonomi dan politik untuk memperkuat legitimasi pemerintah. Hal ini sejalan dengan perspektif Public Choice Theory milik Buchanan (1962) dan Tullock (1967) yang menekankan bahwa aktor politik, bukan efisiensi ekonomi, seringkali menentukan kebijakan publik. Oleh karena itu, ideologi dan kepentingan politik menjadi faktor utama yang membentuk kebijakan ekonomi.

Selain itu, prioritas pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh ideologi politik. Pemerintah yang berorientasi populis biasanya mengutamakan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti subsidi dan bantuan sosial. Pemerintah yang berorientasi liberal, di sisi lain, lebih menekankan pada kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam jangka panjang. Perbedaan ideologi ini menunjukkan bahwa ideologi dan kepentingan politik pemerintah selalu memengaruhi kebijakan ekonomi. Ieologi berfungsi sebagai lensa yang membantu pemerintah melihat masalah ekonomi dan menemukan solusi yang tepat.

4. Politik dan Situasi Sosial-Global

Kebijakan ekonomi Indonesia bergantung pada konteks sosial dan global. Kebijakan fiskal, pajak, dan investasi publik dipengaruhi oleh sistem politik, menurut Persson dan Tabellini (2000). Dalam praktiknya, kebijakan ekonomi Indonesia sering kali dipengaruhi oleh tekanan eksternal, seperti krisis pangan, fluktuasi harga minyak, dan dinamika geopolitik internasional.

Sebagai contoh, kebijakan energi nasional dipengaruhi oleh kebutuhan domestik dan tekanan internasional terkait masalah lingkungan. Situasi internasional saat ini meningkatkan kebutuhan politik untuk menentukan jalan kebijakan ekonomi nasional. Politik berfungsi sebagai pengendali utama untuk menyeimbangkan kepentingan domestik dengan tekanan dari luar. Akibatnya, kebijakan ekonomi yang dibuat adalah hasil dari keseimbangan antara kebutuhan domestik dan tuntutan global.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1625-1633

Selain itu, komponen sosial domestik seperti gerakan masyarakat sipil dan opini publik juga memengaruhi kebijakan ekonomi. Politik berfungsi sebagai mekanisme adaptasi yang memungkinkan kebijakan ekonomi untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan global, meskipun dalam situasi krisis sosial atau ketidakpuasan masyarakat, pemerintah sering menggunakan kebijakan ekonomi populis untuk meredakan ketegangan politik. Ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi tidak hanya mempengaruhi kebijakan, tetapi juga dinamika sosial dan politik yang kompleks.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa politik memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan arah, prioritas, serta keberhasilan kebijakan ekonomi suatu negara. Proses perumusan kebijakan ekonomi tidak berlangsung secara teknokratis atau netral, tetapi merupakan hasil interaksi antaraktor politik, kepentingan ideologis, tekanan publik, serta konteks sosial-ekonomi nasional maupun global. Dengan demikian, kebijakan ekonomi tidak hanya merefleksikan pertimbangan rasional berbasis data, melainkan juga kalkulasi politik yang berkaitan dengan legitimasi kekuasaan dan stabilitas pemerintahan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ada hubungan erat antara institusi politik dan kebijakan ekonomi. Humphreys (2005) menunjukkan bahwa stabilitas dan kualitas institusi politik memengaruhi konsistensi kebijakan ekonomi jangka panjang, sedangkan Persson dan Tabellini (2000) menegaskan bahwa sistem dan desain politik membentuk arah kebijakan fiskal, pajak, dan alokasi anggaran. Selain itu, institusi politik yang inklusif memiliki kemampuan untuk menghasilkan kebijakan ekonomi yang lebih produktif, akuntabel, dan berorientasi pada pemerataan kesejahteraan, dibandingkan dengan institusi politik eksploitatif (Acemoglu dan Robinson, 2012).

Hasil di Indonesia menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ekonomi benar-benar dipengaruhi oleh faktor-faktor politik nasional, termasuk dukungan legislatif, tekanan kelompok kepentingan, dan situasi pemilu. Misalnya, penelitian Kurniawan et al. (2024) menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi sering diputuskan melalui pertimbangan politik daripada rasionalitas teknis. Hal ini mendukung ide Public Choice Theory yang dinyatakan oleh Buchanan dan Tullock, yang menyatakan bahwa dorongan ideologis dan keinginan kekuasaan lebih memengaruhi aktor politik daripada efisiensi ekonomi.

Hal ini menunjukkan bahwa faktor yang membentuk kebijakan ekonomi adalah politik. Ketika institusi berjalan secara akuntabel, stabil, dan responsif terhadap kebutuhan publik, politik dapat menjadi instrumen penguat. Namun, ketika kepentingan kelompok tertentu lebih penting daripada tujuan pembangunan jangka panjang, politik juga dapat menjadi penghambat. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya berhasil, tetapi juga berkeadilan dan bertahan lama, perlu memperkuat institusi demokrasi dan tata kelola politik.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1625-1633

DAFTAR PUSTAKA

Sari, C. D. P., & Ibrahim, H. (2023). Peran Politik dalam Pembentukan Kebijakan Perdagangan Internasional (Studi Perbandingan Antara Negara Maju dan Negara Berkembang). *Jurnal Minfo Polgan*, *12*(2), 2464-2473.

Wahyudin, I., Shodiq, J., & Syntia, N. A. P. (2024). Peran Partai Politik Penguasa Dalam Pembuatan Kebijakan Ekonomi Nasional (Studi Kasus Partai PDI Perjuangan 2019-2024). *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, *5*(1), 21-26.

Risnawan, W. (2017). Peran dan fungsi infrastruktur politik dalam pembentukan kebijakan publik. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, *4*(3), 511-518.

Hudi, M. (2020). Peran Politik dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, *12*(03), 232-248.

Humphreys, M., & Bates, R. (2005). Political institutions and economic policies: Lessons from Africa. British journal of political science, 35(3), 403-428.

Iskandar, D. J. (2017). Pentingnya partisipasi dan peranan kelembagaan politik dalam proses pembuatan kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, *14*(1), 17-35.

Funome, P. I., Hardiyanto, W. T., & Setyawan, D. (2015). Peran Etika Poltik Dalam Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, *1*(2).

Malik, A., Prabowo, D., Priadi, D., & Kamil, E. F. (2023). PENGARUH KEBIJAKAN POLITIK TERHADAP STABILITAS EKONOMI NASIONAL. *Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, *1*(1), 108-114.